

Submission	Review Process	Revised	Accepted	Published
08-05-2021	27-05 s/d 12-07-2021	24-08-2021	28-08-2021	29-08-2021

*Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization, Vol. 2 No.3, Agustus 2021 (184-196)*

Published by: Politik Islam UIN Raden Fatah Palembang

## **Pengaruh Oligarki Dalam Pilkada Ogan Ilir 2015**

**Mohd. Kurniawan**

Politik Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang  
Email: [mohdkurniawan17@gmail.com](mailto:mohdkurniawan17@gmail.com)

**M. Syawaluddin**

Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang  
Email: [syawalibrahim71@gmail.com](mailto:syawalibrahim71@gmail.com)

**Leo Andi Guna**

Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang  
Email: [leoandiguna32@gmail.com](mailto:leoandiguna32@gmail.com)

### **ABSTRACT**

This research is about local oligarchy in the 2015 election of Ogan Ilir. The purpose of this research is to find out how the local political oligarchy occurred in the Ogan Ilir election and what factors caused the local political oligarchy. This study uses the theory of Jeffrey A. Winter, typology of oligarchy, political resources, and the theory of Vedi R. Hadiz, the operationalization pattern of oligarchy at the local level. This research method uses a qualitative research type with a political sociology approach. Then the data sources are parties who are able to read from the local level oligarchic movements from academics, socio-political observers, mass organizations engaged in the socio-political field as well as data from related agencies such as election organizers, data collected through the process of observation, in-depth interviews and documentation, the data were analyzed through data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results showed that the 2015 Ogan Ilir Pilkada became Oligarchy when the candidate pairs for the Ogan Ilir Pilkada appeared to have political advantages that were exclusively individual and also came from the family of the local political elite. official position, formal political rights, intervention power, mobilization power, and material power.

Keywords: *oligarchy, local election, ogan ilir*

## ABSTRAK

Penelitian ini tentang Oligarki tingkat lokal di pilkada Ogan Ilir tahun 2015. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana awal terjadinya Oligarki Politik lokal di pilkada Ogan Ilir dan faktor apa saja yang menyebabkan oligarki politik lokal. Penelitian ini menggunakan teori Jeffrey A. Winter, tipologi Oligarki, sumber daya politik, dan Teori Veda R. Hadiz, pola operasionalisasi Oligarki di tingkat lokal. Dalam metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode pendekatan sosiologi politik. Kemudian sumber data adalah pihak – pihak yang mampu membaca dari gerak oligarki tingkat lokal berasal dari akademisi, pengamat sosial politik, organisasi massa yang bergerak di bidang sosial politik dan juga data – data dari instansi terkait seperti lembaga penyelenggara pilkada, data yang di kumpulkan melalui proses observasi, wawancara yang mendalam dan dokumentasi, data di analisa melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pilkada Ogan Ilir tahun 2015 menjadi Oligarki ketika muncul pasangan calon peserta pilkada Ogan Ilir memiliki keunggulan politik secara eksklusif individu dan juga bersal dari kalangan keluarga elite politik lokal dan selanjutnya faktor yang menyebabkan terjadinya oligarki adalah sumber daya politik yang dimiliki adalah, jabatan resmi, hak politik formal, kekuasaan intervensi, kekuasaan mobilisasi, dan kekuatan material.

Keywords: *oligarki, Pilkada, Ogan Ilir*

## PENDAHULUAN

Oligarki dalam bahasa Yunani *oligarkhia* (pemerintahan oleh yang sedikit) yang terdiri atas *oligo* (sedikit) serta *arkhein* (memerintah). Oligarki secara pemahaman umum adalah suatu kekuasaan yang di kendalikan dan di kuasai oleh kelompok minoritas kecil. Banyak sekali pengertian tentang Oligarki itu sendiri karena bersifat dinamis dan berbeda pada setiap wilayah daerah. Maka yang dapat diamati dari setiap wilayah adalah mengamati bagaimana Oligarki itu terbangun dan faktor apa saja yang mempengaruhi oligarki begitu kuat, seperti apa jenis oligarki itu sendiri dan apa kepentingan dari tujuan berkuasa. (Winter, 2011) Ketika Artikel Leach tahun 2005 “The Iron Law Of what Again” yang merangkum tentang konseptual oligarki kekuasaan. Ia berpendapat bahwasanya oligarki berpusat pada kadar legitimasi dan pergantian kepemimpinan dalam suatu organisasi atau komunitas, didefinisikan lagi oleh Leach oligarki berkonsentrasi pada otoritas dan/atau pengaruh tidak sah yang bercokol kuat di tangan suatu minoritas,biarpun berlawanan dengan kehendak mayoritas.

Pemahaman atas oligarki kekuasaan bermula dengan pengamatan bahwa ketidaksetaraan material menghasilkan ketidaksetaraan politik, apalagi jika hal yang diamati di negara yang menjalankan sistem demokrasi seperti di Indonesia secara tingkat nasional maupun otonomi daerah. Meskipun secara penafsiran tentang demokrasi itu sendiri memiliki anggota komunitas atau masyarakat, yang berhak berpartisipasi secara leluasa serta mendapatkannya untuk memberikan aspirasinya, berbicara, berkumpul dan berserikat, mendapatkan seluruh akses informasi, mengajukan keberatan terhadap sesuatu penolakan yang tanpa di intimidasi. Suatu negara dapat dikatakan demokrasi bersih jika hal yang disebutkan tadi dapat diminimalisir. Artinya proses kedewasaan demokrasi kita sendiri berjalan dengan semestinya apa yang kita harapkan.

Namun kenyataannya saat ini demokrasi yang kita harapkan dapat menjadi penyeimbang kekuasaan secara individualis masyarakat terhadap kekayaan dan kekuasaan politik tidak dapat dikatakan berjalan dengan baik, kekuasaan kekaayaan yang sangat besar masih dipegang dan dikendalikan oleh minoritas kecil yang berdampak pada menciptakan kelebihan kekuasaan yang signifikan di ranah politik. Oligarki kekuasaan politik dapat di kategorikan sesuai dengan, tujuan, sifat, keadaan dan jenis dari kekuasaan dari pada oligarki itu sendiri.

Oligarki di pilkada Ogan Ilir terjadi ketika mantan Bupati sebelumnya kembali bertarung dengan mencalonkan anaknya dalam kontestasi Pilkada Ogan Ilir 2015 Ahmad Wazir Noviadi Mawardi Yahya berpasangan dengan Ilyas Panji Alam yang di usung oleh Partai Golkar, PDIP, PPP, Partai Hanura, PKS, melawan Hemy Yahya yang berduet dengan Muchendi Mahzareki putra Ishak Mekki Wakil Gubernur Sumatera Selatan pada saat itu di usung oleh partai Partai NasDem, PAN, PBB, Partai Gerindra, PKB. Dan pasangan independent Ir H Sobli Rozali M.Si dan Prof. DR. H. M. Taufik Toha D.E.A dengan dukungan 38.646 Jiwayang pada akhirnya di menangkanoleh pasangan calon Noviadi – ilyas setelah di tetapkan Komisi Pemilihan Umum(KPU) Ogan Ilir

Seperti yang dikatakan oleh Hadiz (2010), menjelaskan pola-pola operasionalisasi oligarki di tingkat lokal ditandai oleh, salah satu nya membentuk pola jaringan patronase diantara individu atau yang di istimewaakan, pejabat pemerintahan, politik kekeluargaan pejabat, pengusaha lokal, dan organisasi<sup>1</sup>. Pada Pilkada Ogan ilir tahun tersebut menjadi konstelasi politik kekeluargaan yang menonjol dimana masing – masing calon memiliki keistimewaan terhadap pengaruh keluarga yang sedang menjadi pejabat di pemerintahan. Alat utama dari Oligarki ini merupakan sumber kekayaan dan kekuasaan yang menjadi modal dalam pertarungan pilkada itulah mengapa pada setiap proses Demokrasi Pilkada menjadi salah satu faktor tumbuh subur Oligarki yang menguasai jalannya demokrasi politik lokal seperti pilkada. Hal ini juga berimbas pada perekrutan calon oleh partai yang tidak berjalan dengan semesti mana fungsi dan perlembagaan partai politik itu sendiri karena sudah termasuk dalam pola – pola dari jejaring Oligarki yang ada di dalamnya. Hal ini dapat berdampak buruk terhadap tahapan demokrasi jika penjaringan calon di kuasai oligarki, Demokrasi tidak menjadi sehat peluang – peluang untuk maju bagi yang memiliki kredibilitas namun kekuatan modal material kurang memadai karena biaya politik mahal dan eksklusif harus tertutup.

Semenjak tumbangnya masa Orde baru pada 1998, telah membuka kran demokrasi secara terbuka. Mekanisme pemilihan Kepala Daerah tidak lagi dipilih melalui Perwakilan Rakyat yang ada di parlemen daerah melainkan langsung di pilih oleh masyarakat untuk mendaulat mandat bagi kepala daerah yang nantinya akan menjadi raja – raja kecil baru pada daerah, namun keterbukaan hak – hak demokrasi tersebut tidak menghilangkan daripada masalah – masalah yang ada dalam jalannya demokrasi itu sendiri, Money politik, Politik kekeluargaan seperti telah menjadi budaya yang untuk sulit di hapuskan. Slogan – Slogan seperti Anti dinasti, Oligarki politik kekuasaan, dan

---

<sup>1</sup>Samsuddin A, Indra CG, Sasmito C. 2019 membongkar relasi kekuasaan oligarki di kota batu. Dalam Jurnal *Ilmu Administrasi* Vol. 16(2). Hlm. 212

korupsi yang sering di gaungkan oleh aktivis dan masyarakat yang peduli demokrasi masih belum bisa mengalahkan dari material pada putaran pilkada.

Oligarki Politik kekuasaan tidak hanya pada lingkup secara nasional saja namun juga sampai pada daerah – daerah, banyaknya keluarga yang mengisi jabatan pemerintah saat demokrasi kita baru mau beranjak pada keterbukaan hak suara dan akan menjadi masalah ketika pemegang kekuasaan akan selalu mengakomodir syahwat dan kepentingan politik golongan, dan elite – elite oligarki kecil, semisal yang kita ketahui bersama pada saat 2007 di Provinsi Banten ketika Ratu Atut chosiyah menjadi awal terdeteksinya membangun politik kekeluargaan, dengan mencalonkan keluarga di beberapa Kabupaten yang berada di Provinsi Banten, seperti pada pilkada Tangerang 2008 Adik ipar yang mencalonkan diri menjadi wakil bupati, kemudian Tubagus Chaeral Jaman adik tiri atut menang atas pilkada di serang pada pilkada 2011. Dalam peta politik di Banten pada saat itu adalah patronase kekeluargaan yang memegang kekuasaan sehingga hal ini yang dapat memunculkan praktik KKN dan ketimpangan politik yang tidak bersih di Provinsi tersebut.

Sedangkan di pilkada Ogan Ilir sendiri oligarki tingkat lokal muncul ketika Bupati yang saat itu adalah Mawardi Yahya akan habis masa jabatannya pada 2015, mencalonkan anaknya sebagai bupati selanjutnya untuk melanjutkan estafet kekuasaan dan elite – elite politik lokal daerah yang juga mengusungkan dari golongan keluarga mereka. Hal ini menjadi awal mula dari oligarki, dengan pola yang umum dan hampir sama dengan elite –elite yang berkuasa di daerah lain. Kekuatan framing di masyarakat bahwa harus memilih dari garis keturunan bupati sebelumnya dan kalagan elite yang telah memiliki kekuasaan formal di pemerintahan inilah yang menjadi sebuah yang tertanam, kurangnya partisipasi dan kesadaran politik sosial di masyarakat akan membuat kesadaran politik lemah yang pada akhirnya sulit untuk membuat poros baru dan memunculkan tokoh – tokoh alternatif selain keluarga dari pejabat politik itu sendiri hal itu dapat dilihat dari beberapa historis pasangan calon – calon kepala daerah, bahwa politik kekeluargaan masih bertumpuh kuat menjadi mindset politik pada masyarakat awam.

## **TINJAUAN LITERATUR**

Bedasarkan studi kepustakaan yang telah penulis lakukan, ada beberapa penelitian yang mirip dengan tema penelitian baik dari buku-buku, jurnal, makalah tulisan-tulisan bebas, skripsi, tesis, dan desertasi yang penulis lakukan diantaranya :

Penelitian yang dilakukan oleh Fajar Kuala Nugraha yang berjudul *Pemilukada: Menguatnya Politik Oligarki Lombok Timur Tahun 2013*. Fajar Kuala Nugraha mengkaji tentang kemunculan oligarki pada pilkada tahun 2013 di lombok. Hal itu ia nyatakan bahwa masuknya beberapa pengusaha dalam bursa pilkada yang membuat bahwa pilkada di lombok di kuasai oleh golongan kaya. Dalam penelitian nya dia berpendapat bahwa dua kekuatan penting oligarki terletak pada kekuasaan material dan kekuasaan mobilisasi (Nugraha, 2013)

Penelitian yang dilakukan Ahmad Munjin yang berjudul *Oligarki Dan Demokrasi kajian sumber daya kekuasaan kiai dan jawara banten*. Ahmad Munjin mengkaji tentang pembuktian kekayaan menjadi basis sumber daya kekuasaan oligarki yang sangat dominan dalam demokrasi banten. Temuan ini memperkuat penelitian- penelitian sebelumnya yang menunjukkan kekuasaan oligarkis dalam sistem demokrasi indonesia,

dalam konteks banten uniknya oligarki yang terbentuk mendapatkan legitimasi modern (rasional-legal) sekaligus legitimasi tradisional. Yaitu antara berkuasa secara demokratis dengan sumber daya (rasional –legal) dan penerimaan masyarakat atas kewenangan, keputusan atau kebijakan yang diambil pemimpin dalam ruang lingkup tradisional. (Munjin, 2018)

Buku yang di tulis oleh Jeffrey A. Winter yang berjudul *Oligarki*. Dalam buku nya ia membahas tentang munculnya oligarki melalui konsentrasi kekayaan (stratifikasi materi) dan kekuasaan selain itu dia menerangkan tentang era oligarki, stratifikasi kekayaan oligarki, baik dari model bernegara monarki, otoriterian sampai demokrasi, dan pembahasan mengenai sumber daya kekuasaan oligarki, oligarki dan demokrasi, tujuan oligarki dan sifar oligarki di Indonesia.

Jurnal yang di tulis oleh Dr. Abdur Rozaki M.si yang berjudul *islam, oligarki politik dan perlawanan sosial di madura* dalam jurnalnya ia menjelaskan perubahan penting yang terjadi dalam kaitan dengan dinamika politik dan persilangannya dengan Islam di Indonesia. Di dalamnya mengkaji bagaimana praktek demokrasi elektoral memberikan kesempatan politik bagi lahirnya orang kuat lokal menguasai pemerintahan daerah. Dengan basis sosial keagamaan dominan, orang kuat lokal ini membangun oligarki politik yang dibentengi para jagoan (blater) dan tokoh-tokoh agama. Selain itu ia menjelaskan, bagaimana masyarakat mencoba melawan oligarki politik orang kuat lokal dengan mengembangkan perlawanan sosial yang bermula dari lingkungan dalam ikatan kerabat (geneology) dan juga warga yang tergabung dalam organisasi masyarakat sipil. Mereka mendorong proses demokratisasi melalui tuntutan akses dan partisipasi masyarakat sipil dalam kebijakan pemerintahan. (Rozaki, 2016)

Jurnal yang di tulis oleh Haris Samsuddin Dkk, yang berjudul *Membongkar Relasi Kekuasaan Oligarki Di Kota Batu*. Ia membahas tentang demokrasi Indonesia pasca reformasi yang menunjukkan sebuah gejala politik oleh apa yang kini dikenal sebagai rezim oligarki. Rezim ini ditandai oleh menguatnya relasi bisnis-politik yang menempatkan para aktor pemilik basis sumber daya material terkuat sebagai figur paling dominan pada arena politik. (Syamsuddin, 2016)

Penelitian yang di tulis Heri Junius Nge yang berjudul *Oligarki Partai Politik Dalam Rekrutmen Calon Kepala Daerah* yang membahas tentang sistem kekuasaan yang ada dalam partai politik, proses perekrutan calon yang tidak berjalan demokrasi, Oligarki dalam penentuan calon yang mana memiliki kekuatan materil. (Nge, 2017)

Penelitian yang di lakukan oleh Desi Rahmawati yang berjudul *Demokrasi Dalam Genggaman Para Pemburu Rente* (Studi Kasus Asahan Sumatera Utara). Dalam penelitian ini ia membahas tentang bagaimana minoritas kelompok kecil menguasai demokrasi, cacatnya demokrasi, teori struktur dan agen dalam demokrasi tentang analisis Marxian, Rusaknya demokrasi oleh oligarki, dan pada umunya bagaimana oligarki mengatur jalnya demokrasi demi mewujudkan kepentingan kroni dan kelompok. (Rahmawati, 2015)

Penelitian yang di lakukan oleh Martin Herna Susanti yang berjudul *Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia* yang ia jelaskan mengenai kehadiran dinasti politik yang melingkupi perebutan kekuasaan di level regional hingga nasional tidak terlepas dari peran partai politik dan regulasi tentang pilkada. Oligarki di tubuh partai politik dapat dilihat dari kecenderungan pencalonan kandidat oleh partai politik lebih didasarkan atas keinginan elit partai, bukan melalui mekanisme yang demokratis dengan mempertimbangkan kemampuan dan integritas calon. (Susanti, 2017) Hasil kajian

terdahulu didapati penelitian Oligarki politik adalah yang menjadi kajian – kajian dalam penelitian sosial politik maka oleh karena itu penelitian ini juga ikut mewarnai penelitian terdahulu. Dalam batasan kajian wilayah sosial politik dan geopolitik yang berbeda.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan sosiologi politik. Menurut Rush dan Althoff, ada empat pendekatan yang umumnya dipakai dalam kajian sosiologi politik. Pertama, pendekatan historis. Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada bagaimana fakta-fakta dan peristiwa politik yang terjadi pada pilkada Ogan Ilir Tahun 2015 dan beberapa pandangan tentang historis pilkada Ogan Ilir dengan dapat dibuktikan secara empiris dan objektif. Kedua, pendekatan komparatif (perbandingan). Pendekatan ini lebih menitikberatkan bagaimana dua atau lebih gejala politik yang terjadi di suatu wilayah yang berbeda sesuai dengan judul penelitian ini dan dalam jangka waktu tertentu diperbandingkan persamaannya maupun perbedaannya, sehingga dapat dilakukan analisis. Ketiga, pendekatan institusional. Pendekatan ini lebih bagaimana faktor-faktor kelembagaan, konstitusional, maupun legalitas politik dapat mempengaruhi fenomena politik di masyarakat seperti partai politik dan organisasi yang bergerak dibidang sosial politik. Dengan kata lain, pendekatan ini bersifat makro. Keempat, pendekatan behavioral (tingkah laku). Pendekatan ini adalah kebalikan dari pendekatan institusional. Pendekatan ini lebih menitikberatkan bagaimana tingkah laku individu dalam kegiatan berpolitik di suatu masyarakat.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Di Indonesia sendiri seperti sejarah oligarki yang memuncak pada saat orde baru berkuasa yang mana kekuasaan penuh di pegang dan di kontrol secara langsung oleh tokoh maupun oknum yang menjadikan golongan jejaring oligarki dengan pandangan bahwa Soeharto sebagai penguasa mengendalikan dan mengontrol jalannya sistem yang di bangun oleh Oligarki. Oligarki di indonesia sebenarnya dapat di lihat dengan material kepentingan apa yang di jadikan prioritas utama. Pasca tumbang nya Orde Baru pada 1998, membuka kran demokrasi secara terbuka, yang mana kebebasan berpendapat sudah bisa kita sampaikan secara langsung. Pilkada yang pertama kali berlangsung pada tahun 2005 dengan dasar hukum pertama UU No 32 Tahun 2004 memuat Pemerintahan Daerah, memperkuat keberadaan rakyat dalam mendaulat tunggal pemimpin di daerah. Namun sejak proses jalannya demokrasi pilkada yang menciptakan raja – raja kecil baru ini, menjadi sebuah agenda yang harus di pertahankan dan di perebutkan dengan polarisasi politik yang membentuk dan membuat kekuasaan politik menjadi tidak seimbang, Politik Daerah setelah tumbang nya kekuasaan orde baru, menjadi celah kembali bagi kaum pemodal kembali dan elite daerah lokal untuk menjadi penguasa tunggal, kebanyakan Pilkada yang di langsungkan ini memiliki dinasti dan polarisasi politik yang tersistem dan kemudian menjadi elite penguasa lokal minoritas yang kemudian dapat dikatakan Oligarki.

Pada geopolitik pilkada pada tahun 2015 menjadi sebuah konstelasi politik antar kekuasaan penguasa Oligarki kecil lokal daerah sebagaimana yang telah di jelaskan pada bab sebelumnya, Di tahun 2015 pilkada Ogan Ilir di isi oleh tokoh – tokoh penguasa lokal dan pertarungan elite dalam mencapai kursi orang nomor satu di daerah, Dalam lingkup kekuasaan Oligarki yang bersifat sultanistik di daerah – daerah indonesi pada umumnya memliki kriteria yang sama setelah keruntuhan dari pada rezim orde baru, cenderung

bergerak sebagai motor sendiri – sendiri yang bertumbuh nya di daerah sejak di dilakukannya pilkada, seperti kekuasaan sultanistik keluarga di banten, yang hampir mirip pada pertarungan pilkada di Ogan Ilir.

Dalam hal ini akan di jelaskan hasil dan pembahasan pada saat dilakukannya penelitian dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi di lapangan. Maka dalam hasil nya akan di bahas dan di kategorikan berdasarkan sub – sub yang di tuliskan mengenai dari judul penelitian ini.

Setelah dilakukannya penelitian berdasarkan pengamatan di lapangan mengenai oligarki kekuasaan politik di pilkada Ogan Ilir, awal mula terjadi nya oligarki politik terjadi ketika masing – masing calon memiliki keunggulan secara politik yang tertuju pada dua pasangan calon, yang pertama adalah pasangan Ahmad Wazir Noviadi yang berpasangan Ilyas Panji Alam dari pasangan ini yang di dapat Noviadi merupakan anak dari elite politik lokal H. Ir. Mawardi yahya yang merupakan mantan bupati ogan ilir yang juga ketua DPD partai Golkar Ogan Ilir, secara politik, nama pasangan ini mendapatkan nilai tambah. Kemudian yang kedua, menraiknya pilkda Ogan Ilir juga di isi oleh calon yang memiliki tingkat popularitas yang tinggi pasangan Helmy Yahya dan Muchendi Maharezki Ishak Mekki, diketahui bahwa meskipun Helmy Yahya bukan seorang politisi namun nama besar karena menjadi tokoh publik juga memberikan efek pilihan, dari sisi pasanganya sendiri Mmuchendi Ishak mekki merupakan juga anak dari elite politik lokal Ishak Mekki yang pada saat itu menjabat sebagai Wakil Gubernur Sumatera Selatan. Selain masing – masing calon mendapatkan dukungan dari publik figure dan elite politik lokal, masing – masing calon mendapatkan dukungan dari beberapa partai pengusung, berikut tabel partai pengusung.

Dari dua pasangan ini berdasarkan teori yang di gunakan, peneliti juga membuat konstruksi terhadap apa yang dilihat di lapangan juga merupakan informasi dan fakta – fakta di lapangan dari narasumber mau dari pengamatan terkait faktor yang menyebabkan pilkada ogan ilir menjadi oligarki. Hasil yang di dapat tersebut bahwa pada pilkada di Ogan ilir Tahun 2015. Terdapat poin – poin nilai yang di dapat antara lain:

1. Jabatan Resmi (tokoh pendukung yang berada di dalam kekuasaan yang sedang menjabat maupun pernah menjabat).
2. Hak Politik Formal
3. Kekuasaan Intervensi
4. Kekuasaan Mobilisasi
5. Kekuasaan Material

Dari hasil poin – poin yang di temukan di lapangan peneliti membuat sub variabel hubungan antara poin yang di hasilkan.

Operasionalisasi oligarki di tingkat lokal ditandai oleh, salah satu nya membentuk pola jaringan patronase diantara individu atau yang di istimewaakan, pejabat pemerintahan, politik kekeluargaan pejabat, pengusaha lokal, dan organisasi. Dari penjelasan yang di dapat saat penelitian di lapangan di lihat sebagai berikut:

**Pertama Jabatan Resmi atau lingkaran yang dekat dengan kekuasaan,** masing – masing pasangan di prakasai oleh keluarga yang sedang menjabat atau pernah ada dalam jabatan, jabatan resmi seperti pimpinan elite lokal partai politik ataupun kekuasaan pemerintahan dapat sangat berpengaruh dalam dinamika pilkada apalagi jika sang calon merupakan keluarga maupun lingkaran keluarga.

**Kedua dari Hak Politik Formal** ,masing – masing pasangan calon meskipun dalam demokrasi kita menganut satu orang satu suara, dalam politik praktik dalam hak

politik formal masing – masing calon mendapatkan keistimewaan profil individualis yang bersifat eksklusif, profil individualis yang eksklusif ini adalah di lihat dari hak istimewa yang di miliki seperti anak pejabat, tokoh publik, dan kekayaan.

**Ketiga Kekuasaan Intervensi**, dari kekuasaan intervensi pasangan calon dapat memanfaatkan operasionalisasi dan kendaraan yang ada dari tokoh yang berpengaruh baik itu dalam lingkungan pemerintahan, sosial dan kekeluargaan maupun lembaga – lembaga lain.

**Keempat kekuasaan mobilisasi**, kekuasaan mobilisasi bisa dilakukan dengan cara memanfaatkan jabatan yang ada, sudah barang umum jika seseorang yang sedang menjabat suatu instansi atau lembaga dalam bentuk kekuasaan pemerintahan maupun kekuasaan di partai politik, dapat membentuk kekuatan jejaring dengan melakukan konsolidasi yang masif baik itu dalam seora kelembagaan maupun ketokohan.

**Kelima Kekuasaan Material**, kekuasaan material dapat berbentuk dengan finansial kekayaan sang calon politik yang eksklusif yang saat ini berlangsung membuat kran demokrasi hanya dikuasai oleh elite golongan dan segelintir orang. Dalam kasus penelitian ini dalah di sebut dengan oligarki kekuasaan politik.

Dari kelima point di atas tadi ini yang menjadi dasar awal bahwa pilkada Ogan Ilir begitu eksklusif dan menjadi dasar awal mengapa bisa dikatakan bahwa pilkada Ogan Ilir pada tahun 2015 di Ogan Ilir menjadi Oligarki.

Dalam pembahasan ini di sajikan fakta dan temuan pada saat proses penelitian di lapangan, beberapa nilai yang di dapat seperti di jelaskan pada hasil penelitian di atas, akan di jelaskan secara deksripsi di bagian ini, tentu dengan kupasan teori yang di pakai oleh peneliti, analisis dan pengamatan dari peneliti saat berda di lapangan maupun saat proses wawancara.

Proses demokrasi di ogan ilir yang menjadi objek penelitian yang di jadikan judul penelitan Oligarki kekuasaan politik di pilkada Ogan Ilir Tahun 2015 cukup menarik untuk di kaji, demokrasi yang sejatinya dalah bagaimana bisa merangkul semua dari aspirasi dan kehendak masyarakat banyak adalah tujuan utama bagi masyarakat, seiring dengan proses jalan dan berkembangnya di indonesia fenomena – fenomena politik terus bermunculan, yang tentu bisa bersifat negatif bagi demokrasi indonsesia, seperti kekuatan kaum pemodal, politik golongan dan penguasaan daera secara politik kekeluargaan.

Geopolitik di Ogan ilir menjadi gambaran dan bahasan bahwaanya demokrasi di daerah cenderung mengarah kepada politik kekuasaan keluarga, dinastim ataupun Oligarki kekuasaan politik secara sultanistik.

Pembahasan ini merupakan penting pembahasan bagaimana melihat oligarki kekuasaan politik. Lebih mendalam, Peneliti mencoba mencari pandangan terkait terjadinya Oligarki Kekuasaan Politik dalam konstelasi pilkada di Ogan Ilir, Maka peneliti meminta pandangan dan analisis dari beberapa narasumber yang di anggap menguasai tentang Oligarki dan juga Proses Demokrasi di dalamnya.

Proses terjadi Oligarki kekuasaan politik di Pilkada Ogan Ilir Tahun 2015. Berdasarkan hasil dari penelitian di lapangan dan wawancara kepada narasumber di lapangan. Peneliti mendapati hasil yang di jadikan beberapa sub bagian dan variabel. Peneliti mencoba menggambarkan pola atau patronase dalam pilkada di Ogan Ilir yang mana masing – masing calon memiliki keistimewaan yang ada.

Dalam Lingkaran sumberdaya Politik inividu terhadap masing – masing yang bertarung dalam pilkada Ogan Ilir memiliki Patronase jaringan yang saling memiliki hubungan satu sama lain ketika dasar awal adalah Sumber dari pada kekuasaan Material

dapat mendorong kepada jabatan yang sudah ada yang memprakarsai masing – masing pasangan calon yang berlatar belakang keluarga yang berada dalam lingkaran kekuasaan secara pemerintahan maupun non pemerintahan, sehingga dapat dilihat Hak politik Formal pada umumnya adalah satu orang satu suara dalam demokrasi, di Hak politik formal yang dimiliki pasangan calon di pilkada Ogan Ilir menjadi hak politik formal individu yang eksklusif, pada pilkada Ogan Ilir Kekuasaan material juga berpengaruh dalam kekuasaan mobilisasi baik itu mobilisasi di lingkungan pemerintahan yang bersifat Kekuasaan Intervensi maupun kekuasaan mobilisasi partai politik, Organisasi dan partisipasi masyarakat.

Dari mengapa terjadinya Oligarki di Pilkada Ogan Ilir selanjutnya merupakan faktor pendukung sehingga mengapa Pilkada di tahun tersebut menjadi Oligarki. Dalam penelitian ini dari lima point yang di hasilkan berikut akan di jelaskan mengenai dalam poin penting Faktor Oligarki tingkat Lokal di Pilkada Ogan Ilir.

### 1. Jabatan Resmi

Dalam pembahasan oligarki kekuasaan politik di penelitian ini pada tataran oligarki lokal di daerah di jelaskan pada kerangka teori bahwasanya Oligarki di daerah cenderung memiliki jenis Oligarki kekuasaan Sultanistik, yang berdasarkan golongan, keluarga dan lingkaran kekuasaan. Oligarki di tataran daerah cenderung muncul langsung dalam konstelasi pertarungan, jabatan adalah posisi yang sangat strategis yang sangat di perebutkan sumberdaya kekuasaan material merupakan pokok utama dalam pertarungan pilkada terkhusus di pilkada Ogan Ilir seperti yang di katakan Oleh **Ade Indra Chaniago** seorang akademisi dan pengamat sosial politik, yang memiliki pandangan terhadap Oligarki kekuasaan Politik di pilkada, Di pilkada Ogan Ilir sendiri dirinya mengatakan bahwa :

Posisi orang penting seperti kepala daerah yang mempunyai pengaruh besar maupun elite partai dan juga pemilik dasar material atau kaum pemodal dalam hal ini sangat berperan penting dalam setiap pemilihan langsung pilkada, di Ogan Ilir putaran kekuasaan material dan kekuasaan di pemerintahan berpengaruh besar dalam perebutan posisi orang nomor satu, maka yang harus di lihat bahwa setiap politik yang berbiaya mahal itu lah yang dinamakan Oligarki kekuasaan Politik.

Dalam pemaknaan dan kondisi tentang demokrasi pilkada daerah yang berada dalam kekuasaan atau hubungan dari kaum pemodal yang memperebutkan kekuasaan, Robert Dahl (1998) mengatakan bahwa Hubungan dasar yang sama antara kekuasaan material dan politik dinyatakan kembali lebih dengan zaman kita, kumpulan warga negara yang punya sumber daya berlebih untuk dilibatkan dalam kehidupan politik. Klaim sederhananya adalah bahwa distribusi sumber daya kekuasaan material di antara anggota – anggota suatu komunitas atau lingkaran atau golongan politik, demokratis atau lainnya, punya pengaruh besar pada kekuasaan relatif.

Dalam kekuasaan jabatan seperti yang dijelaskan sebelumnya Oligarki yang bersifat sultanistik cenderung memilih untuk tampil kedalam pertarungan meskipun ada orang yang memang di persiapkan dalam bertarung baik itu garis keturunan maupun golongan, dalam pembahasan jabatan ini, posisi Oligarki atau Oligarki cenderung sebagai centra baik itu dalam pemerintahan maupun non pemerintahan, dalam pembagiannya kekuasaan jabatan dapat dilihat dari dua aspek yang pertama ialah jabatan resmi pada pemerintahan, yang kedua adalah posisi politik dalam jabatan di non pemerintahan seperti partai politik.

Jabatan di pemerintahan (kepala daerah) dalam kasus di pilkada Ogan Ilir masing – masing calon sama – sama di dukung oleh kepala daerah yang sedang menjabat maupun yang pernah menjabat, menjadi pengaruh besar dalam perebutan suara masyarakat, kita lihat bahwasanya pasangan Noviadi – Ilyas panji alam di dukung oleh bupati Ogan Ilir sebelumnya yang merupakan ayah dari dari noviadi, juga selanjutnya pasangan Helmy Yahya – Muchendi di dukung oleh wakil gubernur saat iut (2015) Ishak Mekki, dari sisni dapat kita lihat bahwasanya masing – masing calon pada saat pilkada tahun 2015 berada pada lingkaran kekuasaan dan oligarki kekuasaan politik secara sultanistik garis keturunan keluarga atau golongan.

Jabatan di pemerintahan menjadi posisi central kekuatan mobilisasi dan kekuasaan intervensi tidak bisa kita pungkiri, seperti memobilisasi massa pendukung yang pernah mengantarkan ke posisi jabatan dan pegawai di pemerintahan.

Jabatan di pemerintahan sering kali menjadi sebuah generesai estafet atau penerus dari posisi yang sedang di kuasai, seperti mantan bupati sebelumnya mencalonkan anaknya di kontestasi pilkada, juga selanjutnya wakil gubernur juga mencalonkan anak nya di pilkada yang sama, kekuasaan di pemerintahan seperti membuat pola garis keterununan, posisi kepala daerah yang sedang atau pernah menjabat membuat persiapan bahwa harus dada generasi pemimpin yang selanjutnya setelah di menjabat dari lingkaran posisi politiknya, mempersiapkan anak, keluarga, bahkan golongan politik kolegiannya. Fenomena Oligarki kekuasaan politik ini di pandang oleh salah satu tokoh yang sudah lama di pergerakan dan juga pengamat sosial politik, **Tumpal Simaremare**, Ketua DPD Pospera Sumatera selatan itu mengatakan.

“Memang dulu pernah ada UU yang di buat tentang permasalahan politik keluarga, namun di gugat di Mahkamah Konstitusi, Nah namun memang saat ini belum ada Undang - Undang yang mengatur tentang itu, yang harus kita bicarakan bahwasanya ketika orang - orang yang sedang menjabat atau orang nomor satu di daerah itu apalagi di sumatera selatan cenderung mempersiapkan keluarganya untuk menjadi kepala daerah, boleh – boleh saja ketika posisi kepala daerah itu di isi oleh kekuasaan keluarga, namun keadilan seperti apa yang di tawarkan mereka, perubahan apa, rakyat harus jeli dan kritis dalam melihat posisi suaranya. Siapa yang pantas menciptakan perubahan dan siapa yang lebih baik, bukan karena ia anak pejabat, bukan karena ia anak orang penting”.

Jabatan bagian penting dalam posisi di daerah, orang – orang yang berada di sekeliling atau di dekat posisi jabatan atau dekat dengan pemerintahan yang maju dalam pertarungan pilkada adalah posisi hak politik yang sangat istimewa, Aristoteles dalam bukunya *La Politica* (politik) mengatakan orang yang berada di seputaran jabatan atau di sekeliling jabatan ini adalah memiliki ciri tersendiri, Aristoteles lebih lanjut mengatakan ini adalah tipe politik bangsawan yang di sebut oleh Aristoteles dalam bukunya dengan sebutan Aristokasi yang mana estafet kekuasaan di teruskan dengan orang – orang yang berada di sekitar kekuasaan. (Simaremare, 2021)

Demokrasi yang secara prinsipial mengandung kesetaraan satu orang satu yang sudah di atur dalam hukum negara, ketika dekat atau berada di sekeliling jabatan atau pemerintahan menjadi nilai tambah bagi individu yang membuat individu memiliki hak politik secara eksklusif.

Ketika misalnya kepala daerah mempersiapkan calon dari pembentukannya adalah sebuah hal yang terjadi pada politik lokal daerah, pos – pos jabatan dapat di isi oleh sanak keluarga dan politik kekuasaan golongan, hal ini menjadi menarik ketika pemegang mayoritas suara dapat di kendalikan oleh satu orang sehingga pada politik lokal di daera ini dapat di sebut sebagai Oligarki kekuasaan politik.

Sejatinya Demokrasi pilkada adalah jalan menuju perubahan dan membangun peradaban di daerah menjadi sedikit terhambat ketika harus di hadapkan dengan kekuasaan elite lokal.

Terhadap lembaga negara dan pemerintahan nmenjadi sebuah oligarki kekuasaan karena di atur dalam sensus tertentu, politik kepentingan tertentu, sehingga masyarakat biasa meski menjadi mayoritas, tidak dapat ikut andil mengambil bagian dalam pertarungan meskipun gagasan dan ide yang di gaungkan sangat ideal. Sementara gari golongan yang berkuasa mengisi bagian penting pada setiap daerah, ini adalah geopolitik yang saat ini berlangsung pada demokrasi pilkada saat ini.

Kekuatan dan kekuasaan material dalam hal ini adalah bentuk kekayaan dan modal dari seseorang adalah sumber daya kekuasaan yang menjadi gambaran politik yang eksklusif pada pertarungan politik lokal daerah yang mendefinisikan oligark dalam menggerakkan politik serta proses politik di dalamnya. semenjak pertama kalinya di berlangsung pilkada pada tahun 2005 trend politik mahal seolah menjadi framing yang di bangun oleh kalangan orang yang memiliki modal, kekuatan material dapat dengan mudah mempengaruhi dari jalannya proses politik terutama pada saat pertarungan. Sumber daya material dalam berbagai bentuk sudah lama di kenali sebagai sumber daya yang juga merujuk kepada kekuasaan ekonomi, sosial dan politik seperti yang di katakan Oleh Jeffrey A. winter, bahwa kekuasaan material dapat menimbulkan kekuasaan politik, tidak dapat di pungkiri memang dalam pertarungan politik kekuatan sumber daya modal sebagai amnuisi yang penting, seperti pada kasus di pilkada Ogan Ilir, seorang yang tidak mau di sebutkan namanya mengatakan bahwa dalam setiap pilkada yang terjadi ogan ilir kami warga selalu di datangi oleh tim – tim dari pasangan calon, kami di beri uang dan di suruh memilih pasangan calon tertentu, ketika di tanya bebrapa besarnya, orang tersebut mengatakan sebesar 200 – 250 ribu rupiah. Pola – pola seperti ini yang sering di lakukan oleh pemegang kekuasaan material yang berlebih, terkhusus di pertarungan politik pilkada.

Konsentrasi tinggi kekuasaan material di tangan beberapa pelaku oligark yang pada politik lokal daerah secara langsung muncul kepermukaan tidaklah baru, di demokrasi seperti sekrang ini cenderung menjadi liberal dan bebas. Dalam kasus pilkada Ogan ilir sudah di jelaskan dalam gambaran umum di atas perputaran dalam pilkada, menjadi penggerak yang paling besar, organisasi, relawan, partai, tokoh berpengaruh dan sebuah suara mayoritas yang menjadi objek dalam pilkada yang menggerakkan proses politik dalam pilkada. Jeffery A. winter menegemukakan dalam kajian nya terhadap oligark, ia berpendapat bahwa, ini adalah kemampuan beradaptasi yang fenomenal dari pengaruh material yang membuatnya begitu signifikan dalam isu-isu kekuasaan politik, pengaruh material dapat membeli kekuasaan, dan dan pertahanan kekayaan, baik dalam bentuk kemampuan pemaksaan atau menyewa jasa. (Winter, 2011)

Bentuk dan skala kekuasaan politik yang tak terbayangkan bagi semua kecuali oleh segelintir pelaku dalam masyarakat sepanjang sejarah dari perpolitikan di indonesia. Para elite dengan kekuasaan mobilisasi tinggi dan kekuasaan material yang besar, dengan mudah membangun lewat pergerakan dalam politik lamgsung. Golongan elite yang

dalam pilkada Ogan Ilir, menjadi set pelaku yang sangat berkuasa karenan mereka punya sumber daua material yang besar dan kekuasaan politik melalui jabatan secara resmi baik dalam pemerintahan sampai kepada tubuh partai politik sangat luwes dan mengalahkan sumber daya kekuasaan warga negara biasa yang terpecah – pecah di masyarakat.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dari proses penelitian yang telah di lakukan, peneliti memperoleh kesimpulan yang dapat diambil mengenai penelitian sosial politik ini tentang Oligarki Tingkat Lokal Studi Kasus Pilkada Ogan Ilir Tahun 2015 sebagai berikut :

1. Pilkada Ogan Ilir di tahun 2015 menjadi Oligarki Karena adanya pertarungan antara elite yang berkuasa secara jabatan resmi di pemerintahan ataupun elite politik dalam memperebutkan dan menguatkan posisi politik lokal di daerah.
2. Faktor yang Menyebabkan Oligarki Tingkat Lokal di Pilkada Ogan ilir Tahun 2015 Karena adanya Sumber daya politik yang besar yaitu kekuasaan jabatan resmi, hak politik formal individual yang eksklusif, kekuasaan intervensi baik itu dalam pemerintahan maupun non pemerintahan, kekuasaan mobilisasi pemilih di masyarakat, dan terkahir pertarungan kekuasaan sumber daya material dalam bentuk kekayaan dan penguasaan pertarungan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Fajar.Kuala Nugraha. 2013, *Pemilukada: Menguatnya Politik Oligarki Lombok Timur*.
- Hardani.,dkk. 2020, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Pustaka Ilmu.
- Harisson. Lisa. 2007, *Metedologi penelitian politik*, Jakarta : kencana.
- Herna.Martin S. 2017, *Journal of Government and Civil Society. Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia*.
- Junius.Nge. 2017, *Oligarki Partai Politik Dalam Rekrutmen Calon*.
- La .Husen .Zuada Dkk. 2017, *Desentralisasi dan Oligarki Predator di Wakatobi: Peran Oligarki dan Elit Penentu dalam Pembangunan Perdesaan*. Jurnal penelitian politik Vol.13.No.2
- Munjin. Ahmad. 2018, *Oligarki Dan Demokrasi kajian sumber daya kekuasaan kiai dan jawara banten* Jakarta.
- Prapto.Dinna R. 2020, *Demokrasi dan Inklusifitas*. Jakarta : Friedrich Ebert Stiftung.
- Rahmawati.Desi. 2015, *Demokrasi Dalam Genggaman Para Pemburu Rente (Studi Kasus Asahan Sumatera Utara)*. jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol 1, No. 2
- Samsuddin A,Dkk.2019, *membongkar relasi kekuasaan oligarki di kota batu*. Dalam *Jurnal Ilmu Administrasi* Vol. 16 (2).
- Samsuddin. Haris. Dkk. 2016, *Jurnal Ilmu Administrasi Membongkar Relasi Kekuasaan Oligarki Di Kota Batu*.
- Winter. Jeffrey A. 2011. *Oligarki*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.